



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan berkat dan rahmatnya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini merupakan dasar atau acuan memasukan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun 2025. Rencana Kerja ini juga menjelaskan tentang realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja perangkat daerah mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan renja tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Manggarai Barat



Pius Baut, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19700505 199903 1 006

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Sistematika penulisan
- D. Maksud dan Tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2023

BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2025

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

BAB V : PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi perkembangan keadaan, pemerintah telah menetapkan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang kuat, nyata, dan bertanggungjawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber Nasional serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sesuai dengan prinsip – prinsip Demokrasi. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pembaruan berbagai kebijakan Pemerintah untuk mengakselerasikan implementasi Otonomi daerah, diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengoptimisasikan pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya Daerah, sehingga pada gilirannya Daerah dapat meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi masing-masing dan melanjutkan kesinambungan pembangunan. Namun keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah juga sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia secara sinergis, untuk dimanfaatkan bagi kepentingan dan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Sebagai konsekuensi berlakunya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 pada hakekatnya memberi otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab, maka beban tugas dan volume kerja penyelenggaraan Pemerintahan di daerah menjadi semakin meningkat. Pelaksanaan Otonomi menurut kedua Undang – undang tersebut, diharapkan sebagai instrumen bagi optimalisasi pemberdayaan Sumber Daya Daerah, sehingga pada gilirannya Daerah menjadi pusat pembangunan dan perekonomian.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib membuat perencanaan dalam setiap tahunnya yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan yang wajib dan ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai Dokumen operasional tahunan atau jangka pendek. Selanjutnya SKPD sebagai stakeholder dengan berpedoman pada RPJMD menyusun Renstra dan Renja.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), renja juga merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selain itu, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat merupakan kontrak kerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat dengan Bupati yang dituangkan dalam bentuk visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan target yang harus dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati terpilih maka disusunlah Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan sehingga mampu memberikan arahan pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Manggarai Barat khususnya. Selain itu perlu adanya penataan dan penyempurnaan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia serta peningkatan sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga sangat diperlukan perencanaan Rencana Kerja (Renja) oleh setiap instansi.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RJPD, RPJMD dan RKPD
26. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 219);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 221 ;
 28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/ 2020/ SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
 29. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat adalah:

1. Menjadi dasar penyusunan anggaran belanja melalui APBD kabupaten. Dan menjadi pedoman dan dasar bagi aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan tugas.
2. Memberikan gambaran dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pimpinan instansi.
3. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi serta indikator atau ukuran keberhasilan/ kegagalan pada tahun 2024.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan :

Bab I : Pendahuluan

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PMD Tahun 2023

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), serta pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Bab III : Tujuan, Sasaran Dan Program Kegiatan

Uraian garis besar tujuan, sasaran, serta program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tahun 2025

Bab IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas PMD Tahun 2025

Berisikan jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Bab V : Penutup

BAB II

**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Tahun 2023**

Pencapaian pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat di tahun 2023 menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran untuk tahun 2025

Tabel II.1: Pencapaian Target Keuangan Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,599,968,630	2,583,270,010	99%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,280,300	9,273,000	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,280,300	9,273,000	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,236,106,630	2,219,509,510	99%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,891,772,930	1,885,179,510	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	344,333,700	334,330,000	97%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27,240,000	27,240,000	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27,240,000	27,240,000	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	138,941,700	138,848,000	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,520,500	2,500,000	99%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,328,700	41,310,000	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21,820,000	21,820,000	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,760,000	16,760,000	100%
Penyediaan Bahan/Material	4,018,300	4,000,000	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,000,000	2,000,000	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45,070,000	45,047,000	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,424,200	5,411,000	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60,500,000	60,500,000	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,500,000	20,500,000	100%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40,000,000	40,000,000	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39,000,000	38,999,500	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,000,000	35,999,500	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,900,000	88,900,000	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86,500,000	86,500,000	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,400,000	2,400,000	100%
PROGRAM PENATAAN DESA	74,396,600	73,898,200	99%
Penyelenggaraan Penataan Desa	74,396,600	73,898,200	99%
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	18,048,000	17,639,600	98%
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	25,390,000	25,300,000	100%
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	30,958,600	30,958,600	100%
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	5,820,000	5,800,000	100%
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	5,820,000	5,800,000	100%
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3,820,000	3,820,000	100%
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	-	-	
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2,000,000	1,980,000	99%
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1,744,139,400	1,743,900,000	100%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1,744,139,400	1,743,900,000	100%
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1,650,000,000	1,650,000,000	100%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	6,185,000	6,150,000	99%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	55,850,000	55,790,000	100%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	-	-	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-	-	
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25,184,400	25,040,000	99%
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	5,520,000	5,520,000	100%
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-	-	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1,400,000	1,400,000	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	807,533,900	807,407,564	100%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	807,533,900	807,407,564	100%
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	14,535,000	14,440,000	99%
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	-	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	792,998,900	792,967,564	100%
J U M L A H	5,231,858,530	5,214,275,774	100%

Table II.2 : Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
						I		II		III		IV			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)
	Meningkatnya Keberdayaan Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	100%	2,599,968,630		491,618,383		728,882,406		735,035,925		627,733,996	100%	2,583,270,710
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	10 Dok	9,280,300		2,073,000		3,000,000		-		4,200,000	10 Dok	9,273,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	9,280,300		2,073,000		3,000,000		-		4,200,000	5 Dok	9,273,000
		Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	13 Dok	2,236,106,630		397,881,383		707,402,406		599,651,425		514,574,996	13 Dok	2,219,510,210
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	1,891,772,930		363,476,383		608,702,406		500,951,425		412,049,296	24 Orang	1,885,179,510
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dok	344,333,700		34,405,000		98,700,000		98,700,000		102,525,700	12 Dok	334,330,700

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
					I		II		III		IV				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)
			Pelaksanaan Tugas ASN												
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dok	27,240,000		70,000		9,880,000		9,880,000		7,410,000	1 Dok	27,240,000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Lap	27,240,000		70,000		9,880,000		9,880,000		7,410,000	5 Lap	27,240,000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Adminstrasi Umum	12 Dok	138,941,700		29,091,000		8,600,000		75,977,000		25,180,000	12 Dok	138,848,000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Pkt	2,520,500		500,000				2,000,000		-	10 Pkt	2,500,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Pkt	41,328,700		8,000,000		7,000,000		13,000,000		13,310,000	50 Pkt	41,310,000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	200 Pkt	21,820,000		7,000,000				14,000,000		820,000	200 Pkt	21,820,000

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
					I		II		III		IV				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)
			Kantor yang Disediakan												
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Pkt	16,760,000		4,000,000				7,000,000		5,760,000	20 Pkt	16,760,000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Pkt	4,018,300		1,000,000				3,000,000		-	15 Pkt	4,000,000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	2,000,000						2,000,000		-	12 Lap	2,000,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Lap	45,070,000		7,580,000				34,977,000		2,490,000	20 Lap	45,047,000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dok	5,424,200		1,011,000		1,600,000		-		2,800,000	12 Dok	5,411,000
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Dok	60,500,000		40,000,000		-		17,500,000		3,000,000	2 Dok	60,500,000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	20,500,000						17,500,000		3,000,000	4 Unit	20,500,000

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
					I		II		III		IV				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	40,000,000		40,000,000							1 Unit	40,000,000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3 Lap	39,000,000		4,073,000		-		8,027,500		26,899,000	3 Lap	38,999,500
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	3,000,000		1,000,000				2,000,000		-	12 Lap	3,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	36,000,000		3,073,000				6,027,500		26,899,000	12 Lap	35,999,500
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dok	88,900,000		18,430,000		-		24,000,000		46,470,000	3 Dok	88,900,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	86,500,000		18,430,000				22,000,000		46,070,000	22 Unit	86,500,000

[illegible]

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
					I		II		III		IV				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang menjalin kerjasama desa dan pihak ketiga	4%	5,820,000		1,980,000		3,820,000		-		-	4%	5,800,000
		Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Desa yang difasilitasi dalam menjalin Kerjasama desa	4%	5,820,000		1,980,000		3,820,000		-		-	4%	5,800,000
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2 Dok	3,820,000				3,820,000		-		-	2 Dok	3,820,000
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dok	2,000,000		1,980,000		-		-		-	1 Dok	1,980,000
															-
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menjalankan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan regulasi	35%	1,742,739,400		12,230,000		31,540,000		1,284,432,640		414,297,360	35%	1,742,500,000
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	35%	1,742,739,400		12,230,000		31,540,000		1,284,432,640		414,297,360	35%	1,742,500,000

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
					I		II		III		IV				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dok	1,650,000,000					1,276,012,640		373,987,360	2 Dok	1,650,000,000	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	164 Dok	6,185,000		3,300,000		2,850,000	-	-		164 Dok	6,150,000	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	164 Dok	55,850,000		8,930,000		12,660,000	-		34,200,000	164 Dok	55,790,000	
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Lap	25,184,400				12,960,000	8,420,000		3,660,000	1 Lap	25,040,000	
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	20 Dok	5,520,000				3,070,000	-		2,450,000	20 Dok	5,520,000	
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dok	1,400,000				1,400,000	-		-	1 Dok	1,400,000	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
					I		II		III		IV				
					6		7		8		9				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	15%	814,533,900		4,360,000		135,040,000		219,242,564		448,765,000	15%	807,407,564
			Persentase lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif	66%										66%	
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Propinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	15%	814,533,900		4,360,000		135,040,000		219,242,564		448,765,000	15%	807,407,564
			Persentase lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan	66%										66%	
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dok	14,535,000		4,360,000		4,360,000		2,720,000		3,000,000	1 Dok	14,440,000

[illegible]

BAB III

TUJUAN,SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN RENJA TAHUN 2025

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas PMD

Tujuan adalah Pernyataan-pernyataan tentang hal hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sebagaimana dalam misi pembangunan daerah, maka tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

- *Meningkatnya kemandirian desa*

4.2 Sasaran Jangka Menengah

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun sasaran yang akan menjadi indicator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat adalah:

- *Meningkatnya keberdayaan Desa.*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahun 2025
Meningkatnya kemandirian desa		Indikator Tujuan: Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,5574	0,6824
	Meningkatnya keberdayaan desa	Indikator Sasaran: Persentase desa berkembang	Persen	18,93	33,72

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Rencana kerja dan pendanaan DPMD untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			0,00	
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	0,00
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				DPMD
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	10,000,000	DPMD
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2 Laporan	5,000,000	DPMD
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	0,00
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	33 Orang/bulan	2,361,761,470	DPMD
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	216,000,000	DPMD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	4 Laporan	5,000,000	DPMD
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	0,00	DPMD
	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	5 Laporan	36,000,000	DPMD
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	0,00	DPMD
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	5,000,000	DPMD
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	70,000,000	DPMD
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	60,000,000	DPMD
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	50,000,000	DPMD
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	1 Paket	6,000,000	DPMD
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	12,000,000	DPMD
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan	125,000,000	DPMD
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	12 Dokumen	6,000,000	DPMD
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	1 Unit	30,000,000	DPMD
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	30,000,000	DPMD
	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	45,000,000	DPMD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00	DPMD
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	10,000,000	DPMD
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	48,000,000	DPMD
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	0,00	DPMD
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	10 Unit	121,500,000	DPMD
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	5 Unit	10,000,000	DPMD
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA		-	0,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa		-	0,00	DPMD
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				
			<i>Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa</i>	30 Desa	50,000,000	DPMD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa				
			Jumlah Desa yang Terasilitasi Penataan Wilayahnya	30 Desa	95,000,000	DPMD
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa				
			Jumlah Desa yang Terasilitasi Penataan Kewenangannya	90 Desa	70,000,000	DPMD
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	4 Unit	40,000,000	DPMD
3	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		-	0,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		-	0,00	DPMD
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50,000,000	DPMD
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50,000,000	DPMD
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	75,000,000	DPMD
4	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		-	0,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		-	0,00	DPMD
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	12 Dokumen	2,030,000,000	DPMD
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa</i>	1 Dokumen	40,000,000	DPMD
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	1 Dokumen	75,000,000	DPMD
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</i>	1 Dokumen	50,000,000	DPMD
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</i>	1 Laporan	1,000,000,000	DPMD
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				
			<i>Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun</i>	1 Dokumen	50,000,000	DPMD
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa</i>	1 Dokumen	39,415,425	DPMD
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</i>	1 Dokumen	70,000,000	DPMD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	1 Dokumen	50,000,000	DPMD
5	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		-	0,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	0,00	DPMD
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat</i>	1 Dokumen	40,000,000	DPMD
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	1 Dokumen	60,000,000	DPMD
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	1 Dokumen	800,000,000	DPMD
	JUMLAH				7,996,676,895	

TC. 27 PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	TAHUN-1 2022		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2 13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen	100%	100%	3,717,488,539	100%	4,093,610,962	100%	3,187,794,531		3,249,176,895		3,791,593,817	100%	18,039,664,744
2 13 01 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	17,000,000	11	25,000,000	11	20,000,000	11	20,000,000	11	30,000,000	11	112,000,000
2 13 01 2 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	10,000,000	6	15,000,000	6	10,000,000	6	10,000,000	6	15,000,000	6	60,000,000
2 13 01 2 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	7,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	15,000,000	5	52,000,000
2 13 01 2.02 01	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	13	13	3,045,248,934	13	3,050,248,934	12	2,604,722,531	12	2,665,090,595	12	2,731,967,859	12	14,097,278,853
2 13 01 2.02 02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24	24	2,578,948,934	24	2,578,948,934	24	2,304,157,531	24	2,361,761,470	24	2,420,805,506	24	12,244,622,375
2 13 01 2.02 03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	11	11	456,300,000	11	456,300,000	11	290,565,000	11	293,329,125	11	296,162,353	11	1,792,656,478
2 13 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	18	18	10,000,000	18	15,000,000	18	10,000,000	18	10,000,000	18	15,000,000	18	60,000,000
2 13 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		1	5,000,000	1	5,362,028	4	40,572,000	4	41,586,300	4	47,625,958	4	140,146,286
2 13 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	5	5,000,000	5	5,362,028	5	40,572,000	5	41,586,300	5	47,625,958	5	140,146,286
2 13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	435,000,000	12	601,000,000	12	259,000,000	12	259,000,000	12	542,000,000	12	2,096,000,000
2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	6,000,000	10	10,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	10,000,000	10	36,000,000
2 13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	400	400	50,000,000	400	75,000,000	400	30,000,000	400	30,000,000	400	50,000,000	400	235,000,000
2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	20	70,000,000	20	80,000,000	20	35,000,000	20	35,000,000	20	60,000,000	20	280,000,000

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	TAHUN-1 2022		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2 13 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	5	5	4,000,000	5	6,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	25,000,000
2 13 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	15	15	8,000,000	15	15,000,000	15	6,000,000	15	6,000,000	15	10,000,000	15	45,000,000
2 13 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	200	200	20,000,000	200	30,000,000	200	12,000,000	200	12,000,000	200	20,000,000	200	94,000,000
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	120	205,000,000	120	300,000,000	120	100,000,000	120	100,000,000	120	300,000,000	120	1,005,000,000
2 13 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	50	50	2,000,000	50	5,000,000	50	6,000,000	50	6,000,000	50	7,000,000	50	26,000,000
2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	2	2	76,000,000	2	215,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	200,000,000	2	641,000,000
2 13 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	90,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	-	190,000,000
2 13 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000
2 13 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	36,000,000	2	60,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	50,000,000	2	206,000,000
2 13 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	40,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	1	220,000,000
2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	45,000,000	3	55,000,000	3	57,000,000	3	57,000,000	3	70,000,000	3	284,000,000
2 13 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	10,000,000	12	15,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	15,000,000	12	60,000,000
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	24	30,000,000	24	30,000,000	24	42,000,000	24	42,000,000	24	50,000,000	24	194,000,000
2 13 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	10	5,000,000	10	10,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	30,000,000
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	3	94,239,605	3	142,000,000	3	131,500,000	3	131,500,000	3	170,000,000	3	669,239,605
2 13 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	21	21	94,239,605	21	142,000,000	21	121,500,000	21	121,500,000	21	150,000,000	21	629,239,605

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	TAHUN-1 2022		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit						10	10,000,000	10	10,000,000	10	20,000,000	10	40,000,000
2 13 2	Program Penataan Desa	Persentase desa yang melakukan penataan desa sesuai ketentuan regulasi	Persen	4,88%	18%	8,605,111,810	18%	8,222,212,461	27%	286,000,000	27%	286,000,000	30%	410,000,000	30%	17,809,324,271
2 13 2 2	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan Penataan Desa	Persen	5%	18%	8,605,111,810	18%	8,222,212,461	27%	286,000,000	27%	286,000,000	30%	410,000,000	30%	17,809,324,271
2 13 2 2 01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	0	32	200,111,810	32	104,712,461	32	50,000,000	32	50,000,000	32	50,000,000	32	454,824,271
2 13 2 2 02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	5	32	200,000,000	32	100,000,000	32	100,000,000	32	100,000,000	32	100,000,000	32	600,000,000
2 13 2 2 03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	0	90	200,000,000	90	100,000,000	90	100,000,000	90	100,000,000	90	100,000,000	90	600,000,000
2 13 2 2 04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	164	32	200,000,000	32	100,000,000	32	-	32	-	32	50,000,000	32	350,000,000
2 13 2 2 05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	200,000,000	1	-	1	-	1	-	1	50,000,000	1	250,000,000
2 13 2 2 06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	0%	11	7,605,000,000	11	7,817,500,000	11	36,000,000	11	36,000,000	11	60,000,000	11	15,554,500,000
2 13 3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang menjalin kerjasama desa dan pihak ketiga	Persen	0%	8%	300,000,000	11%	340,000,000	14%	175,000,000	17%	175,000,000	20%	225,000,000	20%	1,215,000,000
2 13 3 2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Desa yang difasilitasi dalam menjalin Kerjasama desa	Persen	0%	8%	300,000,000	11%	340,000,000	14%	175,000,000	17%	175,000,000	20%	225,000,000	20%	1,215,000,000
2 13 3 2.01 01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	0	2	100,000,000	2	125,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	75,000,000	2	400,000,000

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	TAHUN-1 2022		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2 13 3 2.01 02	Fasilitasi Kerja Sama Desa Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	100,000,000	1	115,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	1	390,000,000
2 13 3 2.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	11	2	100,000,000	2	100,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	425,000,000
2 13 4	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase desa yang menjalankan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan regulasi	Persen	21%	28%	1,915,282,728	35%	1,925,000,000	50%	2,377,150,131	65%	3,377,150,132	75%	3,317,150,131	75%	12,911,733,122
2 13 4 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	21%	28%	1,915,282,728	35%	1,925,000,000	50%	2,377,150,131	65%	3,377,150,132	75%	3,317,150,131	75%	12,911,733,122
2 13 4 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	12	12	100,000,000	12	100,000,000	12	1,997,150,131	12	1,997,150,131	12	2,017,150,131	12	6,211,450,393
2 13 4 2.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	5	5	100,000,000	5	100,000,000					5	75,000,000	5	275,000,000
2 13 4 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100,000,000	1	150,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	100,000,000	1	410,000,000
2 13 4 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	164	164	110,000,000	164	200,000,000	164	75,000,000	164	75,000,000	164	150,000,000	164	610,000,000
2 13 4 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	100,000,000	100	450,000,000
2 13 4 2.01 06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	1	1	100,000,000	1	100,000,000					1	100,000,000	1	300,000,000
2 13 4 2.01 07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	1	1	100,000,000	1	100,000,000					1	100,000,000	1	300,000,000

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	TAHUN-1 2022		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2 13 4 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	20	20	100,000,000	20	130,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	100,000,000	20	430,000,000
2 13 4 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	1	1	505,282,728						1,000,000,001	1	100,000,000	1	1,605,282,729
2 13 4 2.01 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	1	1		1	120,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	100,000,000	1	270,000,000
2 13 4 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	30	30	100,000,000	30	115,000,000	30	25,000,000	30	25,000,000	30	75,000,000	30	340,000,000
2 13 4 2.01 12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	75,000,000	1	325,000,000
2 13 4 2.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	1	375,000,000
2 13 4 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan	Orang	100	100		100	100,000,000						100,000,000	100	200,000,000
2 13 4 2.01 15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	32	32	100,000,000	32	110,000,000						-	32	210,000,000
2 13 4 2.01 16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	1	1	100,000,000	1	100,000,000						-	1	200,000,000
2 13 4 2.01 17	Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	1	1		1	100,000,000						-	1	100,000,000
2 13 4 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	50,000,000	1	300,000,000
2 13 5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Persen	63%	64%	900,000,000	100%	1,101,820,050	100%	934,349,869	100%	834,349,868	100%	1,170,340,570	100%	4,940,860,357
		Persentase lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif	Persen	0%	15%	200,000,000	18%	225,000,000	21%	75,000,000	24%	75,000,000	27%	150,000,000	27%	725,000,000

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	TAHUN-1 2022		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2 13 5 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Propinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	Persen	63%	64%	900,000,000	100%	1,101,820,050	100%	934,349,869	100%	834,349,868	100%	1,170,340,570	100%	4,940,860,357
		Persentase lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan	Persen	0%	15%	200,000,000	18%	225,000,000	21%	75,000,000	24%	75,000,000	27%	150,000,000	27%	725,000,000
2 13 5 2.01 01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	75,000,000	1	325,000,000
2 13 5 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	100,000,000	1	125,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	1	400,000,000
2 13 5 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	580	580	100,000,000	580	150,000,000						75,000,000	580	325,000,000
2 13 5 2.01 04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	1	1	100,000,000	1	150,000,000	1	34,349,869	1	34,349,868	1	75,000,000	1	393,699,737
2 13 5 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	100,000,000	1	100,000,000						75,000,000	1	275,000,000
2 13 5 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	100,000,000	1	110,000,000						75,000,000	1	285,000,000
2 13 5 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	100,000,000	1	100,000,000						70,340,570	1	270,340,570

Kode rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal (2020)	TAHUN-1 2022		TAHUN-2 (2023)		TAHUN-3 (2024)		TAHUN-4 (2025)		TAHUN-5 (2026)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2 13 5 2.01 08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen													
2 13 5 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	400,000,000	1	491,820,050	1	900,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	1	3,391,820,050
J U M L A H						15,637,883,077		15,907,643,473		7,035,294,531		7,996,676,895		9,064,084,518		55,641,582,494

 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Manggarai Barat

Pius Baur, S
Pembina Utama Muda
NIP. 19700505 199903 1 006

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2021 - 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penyusunan dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditentukan

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) telah digunakan Pengukuran Kinerja yang merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk memiliki keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, sasaran dan kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat. Melalui pengukuran kinerja, maka keberhasilan suatu instansi pemerintah akan terlihat dari kemampuan sumber daya manusianya mencapai hasil yang maksimal.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan kegiatan tahun 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Manggarai Barat



Plus Bant. SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19700505 199903 1 006